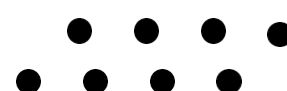




LAPORAN KINERJA 2025

INSPEKTORAT II

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat II dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini disusun dari hasil pengukuran kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian kinerja Inspektorat II dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Inspektorat II dan Inspektorat Jenderal KKP.

Jakarta, 20 Januari 2026
Plt. Inspektur II



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Jayeng Catur Purewanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat II menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku. Tidak hanya itu, Inspektorat II juga menerapkan praktik-praktik terbaik yang berkembang seiring dengan pembelajaran dari hasil evaluasi internal maupun dari organisasi lain (eksternal). Mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan yang ada, Inspektorat II harus memfokuskan pengawasan pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, pengawasan intern berbasis risiko merupakan pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk menghadapi keterbatasan dan tantangan tersebut. Untuk itu, dalam melaksanakan pengawasan intern, Itjen mengedepankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi yang memiliki risiko tinggi dan menjadi perhatian publik dan/atau pimpinan KKP.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat II tahun 2025 adalah “Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan”. Keberhasilan Program ini diukur melalui pencapaian 2 Sasaran Strategis dengan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari 7 IKU tersebut, sebanyak 6 capaian IKU melampaui target yang ditetapkan, sedangkan pencapaian atas 1 IKU lainnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan kondisi capaian ini, nilai kinerja organisasi Itjen yang ditunjukkan dengan Nilai rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) mencapai 112,21%.

Beberapa capaian kinerja Inspektorat II yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja KKP antara lain: a) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II sebesar 0,0045% dari total realisasi anggaran mitra, naik jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu sebesar 0,05%; b) Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat II sebesar 88,93% dan c) Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II sebesar 93,57%.

Tahun 2025 Inspektorat II memperoleh pagu anggaran sebesar Rp4.859.283.000 namun terdapat blokir anggaran sebesar Rp4.566.822.000,00 atau 93,98%. Selanjutnya pada Oktober 2025 blokir anggaran dibuka sebesar Rp1.340.283.000,00 untuk pembiayaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp1.632.744.000. Realisasi anggaran sampai dengan 31

Desember 2025 sebesar Rp1.615.913.349,00 atau 98,97% dengan sisa anggaran sebesar Rp16.830.651,00 atau 1,03%.

Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil (98,97%) dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 112,21%). Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dapat dihasilkan mencapai 12,21%. Efisiensi anggaran ini dapat dicapai oleh Inspektorat II sebagai hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali perjalanan dinas pengawasan. Selain itu, tercapainya efisiensi juga dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis resiko yang memungkinkan pengawasan Itjen lebih tepat sasaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EXECUTIVE	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. TUGAS DAN FUNGSI	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	3
E. ISU STRATEGIS ATAU FOKUS PENGAWASAN TAHUN 2025	4
BAB II. PERJANJIAN DAN PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025	6
1. Visi Inspektorat Jenderal KKP	6
2. Misi Inspektorat Jenderal KKP	6
3. Tujuan	7
4. Sasaran Strategis	7
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	7
C. PERJANJIAN KINERJA LEVEL 2 TAHUN 2025	8
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	10
B. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN	19
1. Realisasi Anggaran Kegiatan	19
2. Realisasi Anggaran per Sasaran Kinerja	19
3. Analisis Kualitas Penggunaan Anggaran (Efisiensi)	20
BAB IV. PENUTUP	21
A. KESIMPULAN	21
B. PERMASALAHAN	21
C. SARAN	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat II	3
Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat II	8
Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2025	10
Tabel 4. Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” Tahun 2025	12
Tabel 5. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas KKP Tahun 2020-2023	12
Tabel 6. Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Mitra Inspektorat II	14
Tabel 7. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2021-2025	14
Tabel 8. Perbandingan Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2021-2025	16
Tabel 9. Realisasi Anggaran masing-masing Sasaran Kinerja	20

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dari Asta Cita yang telah ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya terdapat dua agenda yang terkait langsung dengan peran Inspektorat Jenderal. Agenda tersebut adalah terkait “Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan Ekonomi Biru” (agenda kedua) dan terkait “Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Pencegahan Korupsi” (agenda ketujuh).

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peran Itjen KKP secara rinci terbagi dalam beberapa fokus yaitu :

1. Mengawal Ekonomi Biru.
2. Pencegahan korupsi dan *Good Governance*.
3. Evaluasi Pelayanan Publik.

Namun demikian, hal tersebut belum optimal. Masih terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting. Diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan.

B. DASAR HUKUM

Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
3. Pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, serta seluruh UPT di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP;
4. Koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
5. Pelaporan hasil pengawasan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat II.

D. STRUKTUR ORGANISASI



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat II pada Tahun 2025 sebanyak 33 orang dengan rincian sebagaimana tersaji pada Tabel 1. di bawah ini

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat II

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur II	1 Orang
2.	Auditor Utama	2 Orang
3.	Auditor Madya	6 Orang
4.	Auditor Muda	8 Orang
5.	Auditor Pertama	15 Orang
6.	Auditor Terampil	1 Orang
7.	APKAPBN Madya	1 Orang
8.	APKAPBN Pertama	1 Orang

9.	Perencana Muda	1 Orang
10.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1 Orang
11.	Pengelola Surat	1 Orang
12.	Staff Pelaksana	1 Orang
13.	Driver	2 Orang
Total		33 Orang

Pada Oktober 2025 terjadi penggantian pimpinan organisasi Inspektorat II, yaitu Ir. Lutfi yang mengakhiri masa tugasnya sebagai Inspektur II digantikan oleh Ir. Jayeng Catur Purewanto M.M. sebagai Plt. Inspektur II, sehingga Struktur Organisasi Inspektorat II mengalami perubahan dan dapat dilihat pada gambar berikut.



E. ISU STRATEGIS ATAU FOKUS PENGAWASAN TAHUN 2025

Isu strategis atau fokus pengawasan Tahun 2025 yang diemban oleh Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap:

- a. Reviu atas Dokumen Perencanaan DED Hasil Pekerjaan CMC Proyek IFP IFM Phase I pada PPN Pengembangan dan PPN Kejawatanan.
 - b. Pemantauan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
2. Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP:
 - a. Evaluasi atas Pengawasan Program Prioritas Blue Economy Perluasan Kawasan Kawasan Konservasi Laut, Pengawasan dan Pengendalian WP3K, Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat Berkelanjutan serta Pembersihan Sampah Plastik di Laut.
 - b. Pemantauan Kegiatan Operasi Pesawat Patroli.
 - c. Evaluasi Kegiatan Operasional Kapal Pengawas.
3. Pengawasan Kinerja Manajerial pada Mitra Inspektorat II
 - a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
 - b. Pelayanan Publik
 - c. Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPIP)
 - d. Penanganan Benturan Kepentingan
4. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK
5. Pemantauan Tindak Lanjut pada Mitra Inspektorat II
6. Pengawasan Tematik/Mandatory pada Mitra Inspektorat II
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
 - b. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PA dan PBJ)
 - c. Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (LK dan BMN)
 - d. Laporan Kinerja (LKj)
 - e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - f. Manajemen Risiko (MR)
 - g. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)

BAB II PERJANJIAN DAN PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025

Adapun visi-misi Itjen Renstra 2025 – 2029 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi Inspektorat Jenderal KKP

Didasarkan pada visi KKP tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” untuk mewujudkan visi Presiden Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dapat diartikan bahwa KKP mendukung penuh Visi Presiden khususnya dalam hal pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Dukungan KKP dalam bentuk visi tersebut juga menjadi acuan bagi Itjen KKP dalam menentukan arah pengawasan internal selama kurun 5 (lima) tahun pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029.

Sebagai unsur pengawas intern di lingkungan KKP, visi Itjen KKP juga disusun untuk mendukung Visi Presiden secara umum dan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2025-2029 adalah

**“Terwujudnya Pengawasan Intern yang Andal dan Bernilai Tambah
Dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan”.**

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai Itjen KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pemerintahan yang berorientasi pada hasil, bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dan *clean government*.

2. Misi Inspektorat Jenderal KKP

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Inspektorat Jenderal merumuskan misi yang mencerminkan mandat dan kegiatan inti pengawasan intern. Misi tersebut menjadi pernyataan Inspektorat Jenderal atas keberadaan, dan tindakan operasional organisasi pengawas intern dalam mencapai visi organisasi. Misi tersebut dirumuskan berupa **“Menyelenggarakan pengawasan intern yang**

profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Jenderal sebagaimana diruraikan di atas, tujuan dari penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan KKP adalah **“Terwujudnya pengawasan intern yang efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”.**

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja eselon I merupakan Sasaran Program yang menjabarkan kondisi yang harus dicapai atau diwujudkan dalam tataran operasional sebagai ukuran dari tercapainya tujuan. Sasaran Program diukur melalui indikator kinerja yang menjadi ukuran kualitatif atas tercapainya Sasaran Program.

- a. **Sasaran Pertama**, yaitu Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP. Sasaran tersebut merupakan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tujuan pengawasan intern terhadap kinerja organisasi KKP yang diukur melalui indikator kinerja terkait nilai temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP, implementasi Reformasi Birokrasi KKP, rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP, dan kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Inspektorat Jenderal.
- b. **Sasaran Kedua**, yaitu Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel dan Andal. Sasaran tersebut menjadi bentuk keseriusan Inspektorat Jenderal dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP. Sasaran tersebut diimplementasikan dengan beberapa ukuran indikator kinerja mengenai kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal, implementasi sistem informasi pengawasan, dan implementasi reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP pada Tahun 2025, Inspektorat II melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern pada Mitra dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.644.083.000,00 dengan rencana output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sebanyak 3 Laporan dan Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.215.200.000,00 dengan output 1 Laporan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut antara lain:

1. Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.644.083.000,00 terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp880.730.000,00;
 - b. Pengawasan Akuntabilitas Non Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.054.625.000,00;
 - c. Dukungan Operasional Pengawasan pada Mitra Inspektorat II dengan alokasi anggaran sebesar Rp708.728.000,00;
2. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.215.200.000,00.

C. PERJANJIAN KINERJA LEVEL 2 TAHUN 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sebagaimana disampaikan pada Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2. Penetapan Kinerja Inspektorat II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Pengawasan Intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II	≤ 0,50%
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat II	86%
		3	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat II	85%
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II	4 Dokumen
2		5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat II	85

	Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal lingkup Inspektorat II	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat II	80%
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat II	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan kedalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis/kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja Inspektorat II untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap 3 bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di kinerjaku.kkp.go.id.

Pada Tahun 2025, Sasaran kinerja Inspektorat II terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) yang diukur keberhasilan pencapaiannya melalui capaian 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini dapat dilihat sebagaimana Tabel 3. di bawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Pengawasan Intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II	≤ 0,50%	0,045%	120%	Capaian melebihi target
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat II	86,00%	88,93%	103,41%	Capaian melebihi target
		3	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan	85,00%	93,57%	110,08%	Capaian melebihi target

			kinerja lingkup Mitra Inspektorat II				
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II	4	5	120%	Capaian melebihi target
2	Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal lingkup Inspektorat II	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat II	85,00	92,58	120%	Capaian melebihi target
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat II	80,00%	90,19%	112,74%	Capaian melebihi target
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat II	100%	100%	100%	Capaian mencapai target

Analisis atas capaian kinerja terhadap IKU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

SK-1 : Pengawasan Intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah

SK ke-1 “Pengawasan intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah” pada Level II didukung oleh 4 (empat) IKU yaitu

1. IKU-1 “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II”
2. IKU-2 “Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat II”
3. IKU-3 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II”
4. IKU-4 “Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II”.

Pada Tahun 2025, dilakukan pengukuran terhadap keempat IKU tersebut dengan gambaran sebagai berikut:

IKU 1 : Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II

IKU ini menggambarkan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi KKP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran KKP tahun 2024. Pengukuran IKU ini dengan menggunakan Polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” sebesar 0,0045%, realisasi tersebut melampaui target

yang ditetapkan sebesar $\leq 0,5\%$. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada Tabel 4. di bawah ini.

Tabel 4. Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Ditjen Perikanan Tangkap	860.627.463.236	35.794.407	$\leq 0,5$	0,004%	120
2	Ditjen PSDKP	995.498.070.995	50.381.000	$\leq 0,5$	0,005%	120
TOTAL		1.856.125.534.231	86.175.407	$\leq 0,5$	0,0045%	120

Adapun keberhasilan capaian IKU ini didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat II antara lain Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Reviu Penganggaran, Reviu LK, Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan, Pengawasan Penyerapan Anggaran, Pengawasan Pengelolaan BMN, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa, PTL hasil pemeriksaan BPK dan Pengawasan Tematik Lainnya (Kegiatan Prioritas, PNB, dll)

Jika dibandingkan dengan pencapaian IKU ini dengan Tahun 2024, IKU capaian nilai temuan materialitas KKP Tahun 2024 tidak mengalami perubahan (capaian melebihi target). Selanjutnya jika dibandingkan selama 5 tahun (Tahun 2021-2025), IKU capaian nilai temuan materialitas KKP cenderung stabil dan juga selalu melebihi target tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kinerja yang baik dari Inspektorat II dalam mendampingi Mitra dalam penyelesaian setiap temuan eksternal KKP, sebagaimana diuraikan pada Tabel 5. di bawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Nilai Temuan Materialitas KKP Tahun 2021- 2025

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II	≤ 1	0,25	≤ 1	0,01	≤ 1	0,01	≤ 1	0,09	$\leq 0,05$	0,0045

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

IKU-2 : Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup mitra Inspektorat II

Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur tingkat implementasi reformasi lingkup mitra Inspektorat II berdasarkan persentase realisasi rencana aksi RB Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP.

Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada indikator yang mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi lingkup Unit Eselon I berdasarkan persentase realisasi rencana aksi RB Unit Eselon I yang telah ditetapkan.

Adapun hasil pengukuran kinerja tersebut pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah senilai 88,04% dan Ditjen PSDKP adalah senilai 89,82%, sehingga realisasi IKU Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat II **88,93%**. Hasil ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 86%, sehingga capaian kinerja yang dicapai Inspektorat II untuk IKU ini adalah sebesar 103,41.

IKU Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat II adalah IKU yang pengukurannya baru dilaksanakan pada TA 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan pencapaian IKU ini dengan tahun sebelumnya.

IKU-3 :Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II

IKU ini menggambarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) ditargetkan sebanyak 86% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

Berdasarkan hasil pengukuran IKU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh mitra kerja Inspektorat II mencapai 93,57%, dari target sebesar 86% sehingga persentase capaian IKU terhadap target adalah 110,08%. Rincian capaian IKU ini diuraikan pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% (Tuntas)	Sisa Rekomendasi	% (sisa Rekomendasi)
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	279	245	87,81	34	12,19
2.	Ditjen PSDKP	250	250	100	0	0
	Total	529	495	93,57	34	6,42

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2024, IKU capaian Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2025 mengalami kenaikan realisasi sebesar 1,22%, yaitu dari 92,35% menjadi 93,57%. Selanjutnya jika dibandingkan pencapaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, nilai pencapaian target dari IKU ini menunjukkan kecenderungan adanya tren kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Mitra Inspektorat II (DJPT dan DJPSDKP) menindaklanjuti temuan dengan cukup baik dan pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Inspektorat II telah dilakukan secara intensif. Secara lengkap hasil capaian IKU ini dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2020-2025

Indikator Kinerja	2021		2023		2023		2024		2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II	65	87,28	70	91,78	75	86,81	80	92,35	86	93,57

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat II untuk mendukung capaian IKU tersebut yaitu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, Koordinasi/Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan baik secara internal maupun eksternal Itjen KKP dan Layanan Tindak Lanjut Online melalui Aplikasi SIDAK.

IKU-4 : Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat kepada seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi.

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang diberikan kepada mitra kerja sesuai dengan target masing-masing Inspektorat pada perjanjian kinerja. Pada Tahun 2025, target Inspektorat II adalah 4 rekomendasi kebijakan.

Cara pengukurannya adalah melihat jumlah kajian/rekomendasi yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat terhadap peraturan/kebijakan/sistem/prosedur operasional mitra kerja atau unit kerja lainnya yang dilaksanakan dan disampaikan pada Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran IKU sampai dengan Triwulan IV, capaian jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan yang sudah dicapai sebanyak 5 (lima) rekomendasi, yang berarti telah mencapai target 120%.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan tahun 2024, IKU capaian Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II tahun 2025 ada kenaikan jumlah rekomendasi, yaitu sejumlah 1 dokumen. Adapun jika dibandingkan pencapaian IKU ini sejak Tahun 2021 sampai dengan 2025 pencapaiannya selalu mencapai target dan tidak fluktuatif. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Perbandingan Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II Tahun 2021-2025

Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II	4 dok	4 dok	4 dok	5 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	5 dok

Keterangan:
R = Realisasi
T = Target

Adapun 5 (lima) rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat II selama Tahun 2025 yaitu

1. Masukan atas Perencanaan Induk Pengembangan dan Standarisasi Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengawasan.
2. Tanggapan dan Masukan atas Mekanisme Pembiayaan Kegiatan Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.
3. Tanggapan dan Masukan atas Rencana Pengembangan Aplikasi TemanSPB dan SHTI.
4. Telaah atas Pengenaan Denda Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Air Laut selain Energi (ALSE).
5. Telaah dan Masukan Terkait Substansi Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administratif atas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target IKU ini adalah pengawasan (reviu)/kajian terhadap peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur administrasi/operasi lingkup mitra kerja Inspektorat II.

SK-2: Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat II

SK ke-2 "Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat II" pada Level II didukung oleh 3 (tiga) IKU yaitu:

1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat II.
2. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat II.
3. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Inspektorat II.

Pada Tahun 2025, dilakukan pengukuran terhadap ketiga IKU tersebut dengan gambaran sebagai berikut,

IKU-5 :Nilai Telaah Sejawat Inspektorat II

Telaah sejawat adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Inspektorat lain lingkup Itjen KKP. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit sesuai dengan pengawasan intern.

Nilai telaah sejawat Inspektorat diperoleh dari hasil kegiatan telaah sejawat antar Inspektorat lingkup Itjen yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan menggunakan kerangka penilaian yang disepakati.

Pengukuran capaian kinerja ini yang berdasarkan Memorandum Inspektur IV Nomor 101/ITJ.4/HP.550/V/2025, tanggal 26 Mei 2025, hal Laporan Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal Tahun 2025, diketahui bahwa hasil telaah sejawat Inspektorat II memperoleh nilai **92,58 (Sangat Baik)**, atau melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 85,00.

IKU Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat II adalah IKU yang pengukurannya baru dilaksanakan pada TA 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan pencapaian IKU ini dengan tahun sebelumnya.

IKU-6 :Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Inspektorat II

Merupakan suatu ukuran dari implementasi pemanfaatan sistem informasi dalam membantu dan mendukung tugas pelaksanaan pengawasan intern oleh unit kerja lingkup Itjen KKP.

Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat II diukur berdasarkan tingkat pemanfaatan aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) dalam hal kepatuhan penyampaian (*upload*) Laporan Hasil Pengawasan (LHP) (bobot 50%) serta tingkat pemanfaatan aplikasi SIDAK dalam hal kepatuhan dalam hal input data hasil pengawasan (bobot 50%).

Hasil pengukuran IKU ini pada periode Triwulan II adalah 87,50% yaitu dari 64 kegiatan mitra Inspektorat II, laporan kegiatan yang telah diunggah adalah sejumlah 56 laporan kegiatan. Pada periode Triwulan IV terjadi peningkatan hasil yaitu dari 265 kegiatan mitra Inspektorat II, laporan kegiatan yang telah diunggah adalah sejumlah 239 laporan kegiatan atau 90,19%. Target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah 80,00% sehingga pencapaian kinerja IKU tersebut adalah 112,74%.

IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat II adalah IKU yang pengukurannya baru dilaksanakan pada TA 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan pencapaian IKU ini dengan tahun sebelumnya.

IKU-7 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat II

Suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat yang dijalankan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Inspektorat II dilakukan setiap Triwulan terhadap kepatuhan dalam hal kesesuaian format dan ketepatan waktu pelaksanaan aktivitas pengelolaan kinerja dan anggaran.

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan hasil verifikasi oleh Sekretariat Itjen diketahui bahwa Inspektorat II telah memenuhi seluruh dokumen pengelolaan kinerja dan anggaran dengan dengan capaian sesuai target 100,00%. Adapun dokumen tersebut terdiri dari:

- a. Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I-IV Tahun 2025;
- b. Pengisian data capaian kinerja Triwulan I-IV Tahun 2025 pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP;
- c. Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Triwulan I-IV Tahun 2025;
- d. Penyampaian LPJ Keuangan Triwulan I-IV Tahun 2025.

IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran adalah IKU yang pengukurannya baru dilaksanakan pada TA 2025, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan pencapaian IKU ini dengan tahun sebelumnya.

B. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Tahun 2025 Inspektorat II memperoleh pagu anggaran sebesar Rp4.859.283.000, namun terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Blokir anggaran sebesar Rp4.566.822.000,00 atau 93,98%;
- b. Pada Oktober 2025 blokir anggaran dibuka sebesar Rp1.340.283.000,00 untuk pembiayaan kegiatan Pengawasan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
- c. Pagu efektif yang dapat digunakan sebesar **Rp1.632.744.000**, terdiri dari:
 - 1) Kerja Sama dan Sinergi Pengawasan Intern sebesar **Rp1.340.283.000,00**;
 - 2) Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sebesar **Rp252.377.000,00**;
 - 3) Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II sebesar **Rp40.084.000,00**.

Berdasarkan pemantauan pada Aplikasi SAKTI, diketahui bahwa realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar **Rp1.615.913.349,00** atau **98,97%** dengan sisa anggaran sebesar **Rp16.830.651,00** atau **1,03%**.

2. Realisasi Anggaran masing- masing Sasaran Kinerja

Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran, maka anggaran operasional Inspektorat II dirancang untuk mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya Sasaran Strategis dan tujuan. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Kinerja (strategis) Itjen tahun 2025 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Realisasi Anggaran masing- masing Sasaran Kinerja

SASARAN KINERJA	KEGIATAN	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1. Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah 2. Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat II	Kerja Sama dan Sinergi Pengawasan Intern	1.340.283.000	1.324.551.693	98,83
	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II	252.377.000	252.308.956	99,97
	Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II	40.084.000	39.052.700	97,43
TOTAL		1.632.744.000	1.615.913.349	98,97

3. Analisis Kualitas Penggunaan Anggaran (Efisiensi)

Pengukuran kinerja **value for money** pada organisasi sektor publik dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam **value for money** berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program pengawasan Inspektorat II tahun 2025 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi.

Efisiensi Capaian Kinerja *Output* berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.615.913.349,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,03% dalam menghasilkan *output*.

Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi bila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan rata-rata capaian kinerja organisasi tahun 2025, diketahui bahwa sumber daya anggaran Inspektorat II digunakan secara efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil 1,03% dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 112,21%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan (NPSS) sebesar 12,21%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kegiatan yang mendukung kinerja Itjen KKP tahun 2025 antara lain:

1. Pengukuran kinerja Inspektorat II periode Tahun 2025 dengan menggunakan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id menunjukkan capaian kinerja Itjen KKP Tahun 2025 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 112,21% dan secara umum capaian kinerja Inspektorat II di atas target, sehingga perlu dipertahankan atau ditingkatkan.
2. Pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id Tahun 2025 sebanyak 7 IKU seluruhnya mencapai target, dengan 6 IKU yang melebihi target 100% dan 1 IKU yang mencapai target 100%.
3. Beberapa capaian kinerja Inspektorat II yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja KKP antara lain:
 - a. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II sebesar 0,0045% dari total realisasi anggaran mitra.
 - b. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat II sebesar 88,93%.
 - c. Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II sebesar 93,57%.
4. Total realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.615.913.349,00 atau 98,97% dari pagu efektif sebesar Rp1.632.744.000,00. Dari total realisasi anggaran tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat II cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang tersedia dapat menghasilkan capaian melebihi dari target.

B. PERMASALAHAN

Pada dasarnya seluruh target Indikator Kinerja pada Tahun 2025 telah terpenuhi dan melebihi target, namun terdapat catatan yang harus diperhatikan, yaitu dalam hal pelaporan hasil pengawasan yang belum seluruhnya tepat waktu dan diunggah ke situs ams.kkp.go.id.

C. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan juga untuk mengoptimal capaian IKU Inspektorat II, telah dilakukan arahan kepada para auditor dan staff untuk melakukan percepatan penyelesaian laporan hasil penugasan yang selanjutnya diunggah ke ams.kkp.go.id sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dan terciptanya tertib administrasi.